



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2675 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN BANGUNAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

sa.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 2675 TAHUN 2016
Tanggal 7 Desember 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah			Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
1	Tanah Bangunan Gedung	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.02.03	1	Jalan Swasembada Barat III/2 Kel.Kebon Bawang Tanjung Priuk Jakarta Utara	-	-	150	1972	-	137.400.000	
2	Tanah Bangunan Kantor	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.04.01	2	Jalan Gunung Sahari II No. 6 Jakarta Pusat	-	-	2.172	1973	-	6.950.400.000	
3	Tanah Bangunan Gedung	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.02.03	3	Pulau Panggang RT 03/03 Kab.Kepulauan Seribu	-	-	288	1975	-	29.694.900	
4	Tanah Bangunan Gedung	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.02.03	4	Kramat Raya Jakarta Pusat	-	-	170	1975	-	342.210.000	
5	Tanah Bangunan Gedung	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.02.03	5	Pulau Tidung RT 03/03 Kab.Kepulauan Seribu	-	-	300	1976	-	14.400.000	
6	Tanah Bangunan Gedung	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.02.03	6	Pulau Kelapa RT 05/04 Kab.Kepulauan Seribu	-	-	217	1976	-	16.267.500	
7	Tanah Bangunan Gedung	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.02.03	7	Jalan Raya Tanjung Barat	-	-	90	1978	-	72.180.000	

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah			Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
8	Tanah Bangunan Gedung	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.02.03	8	Pulau Untung Jawa RT 02/03 Kab.Kepulauan Seribu	-	-	596	1980	-	38.131.200	
9	Tanah Bangunan Gedung	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.02.03	9	Kel.Lebak Bulus Kp.Karang Tengah RT 01/02 Jakarta Selatan	-	-	12.110	1983	-	17.147.760.000	
10	Tanah Kosong	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.05.005	10	Pulau Tidung Kecil Kel.Pulau Tidung Kab.Kepulauan Seribu	-	-	51.900	1987	-	174.750.000	
11	Tanah Bangunan Gedung	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.02.03	11	Kel.Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur	-	-	300	1989	-	450.000.000	
12	Tanah Bangunan Gedung	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.02.03	12	Pulau Pari RT 01/01 Kab.Kepulauan Seribu	-	-	987	2003	-	47.385.600	
13	Tanah Bangunan Gedung	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.02.03	13	Pulau Harapan RT 01/01 Kab.Kepulauan Seribu	-	-	614	2003	-	37.441.800	
14	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	11.09.0.09.01.00.00.00.000	01.01.11.04.000	14	Jalan Peta Utara RT 02 RW 06 Kel.Pegadungan Jakarta Barat	-	-	2.372	2010	-	3.499.861.500	

B. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register			Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak				
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.01.04	005	Jalan Swasembada Barat III/2 Kel.Kebon Bawang Tanjung Priuk Jakarta Utara	Kurang Baik	Tidak Bertingkat	-	54	1972	APBD	61.992.000

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Bertingkat/Tidak Bertingkat	Beton/Tidak				
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.01.04	006	Kurang Baik	Tidak Bertingkat	Beton	54	1975	APBD	61.992.000
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.01.04	001	Baik	Bertingkat	Beton	2.172	1973	APBD	5.175.296.132
4	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.09.01	002	Baik	Bertingkat	Beton	3.976	1973	APBD	9.179.050.250
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.01.04	008	Kurang Baik	Tidak Bertingkat	Beton	72	1978	APBD	82.656.000
6	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.09.01	037	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	152	1976	APBD	243.200.000
7	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.09.01	035	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	132	1980	APBD	211.200.000
8	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.01.01	003	Baik	Bertingkat	Beton	2.072	1983	APBD	3.915.135.000
9	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.01.01	043	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	200	1989	APBD	320.000.000
10	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.01.01	036	Kurang Baik	Tidak Bertingkat	Beton	160	2003	APBD	179.200.000

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak				
11	Gudang Logistik	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.01.001	001	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	-	2014	APBD	1.456.382.744
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	11.09.0.09.01.00.00.00.000	03.11.01.01.04	007	Kurang Baik	Tidak Bertingkat	Beton	90	-	APBD	103.320.000

